



LAPORAN — PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI FAKFAK

YOS SUDARSO NO.92 WAGOM. FAKFAK - PAPUA BARAT
(0956) 22413

pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
www.pn-fakfak.go.id

PN FAKFAK
BISA TERBINA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Fakfak dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2023.

Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan Tahun 2023 ini masih belum sempurna dari tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas kerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak kedepan.

Fakfak, 8 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Fakfak, which is a circular emblem with a central figure and the text 'PENGADILAN NEGERI FAKFAK' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum

NIP: 19770331 200212 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB. I Pendahuluan	5
BAB. II Penyelesaian Perkara	10
A. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Fakfak	10
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	11
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	11
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	11
B. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Fakfak	11
- Jumlah sisa perkara yang diputus	12
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	12
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	12
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	13
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	13
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	13
- Posbakum (Satker yang mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran)	13
- Sidang keliling / pelayanan terpadu	15
- Perkara Prodeo	15
BAB III. Sumber Daya Manusia	16
- Data Pegawai	16
- Tenaga Honor	17

-	Kebutuhan Pegawai	18
-	Mutasi	19
-	Promosi	20
-	Pensiun	21
-	Diklat	21
BAB IV.	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	23
A.	Pengelolaan Keuangan	23
B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	27
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	32
-	Implementasi e-Court di pada Pengadilan Negeri Fakfak	33
-	Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Fakfak	36
BAB V.	Peningkatan Pelayanan Publik	39
-	Akreditasi Penjaminan Publik	39
-	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	41
-	Inovasi Pelayanan Publik	48
BAB VI.	Pengawasan	58
A.	Internal	58
B.	Evaluasi	63
BAB VII.	Penutup	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Rekomendasi	64

1

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa sasaran Bidang Hukum adalah terwujudnya sistem Hukum Nasional yang menjamin tegaknya supremasi Hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah guna menciptakan GOOD GOVERNMENT dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan sangat urgent untuk dikedepankan sehingga praktek peradilan dan penampilan peradilan akan semakin tertib, handal, jujur, berwibawa dan bermartabat dimata publik.

Kekuasaan Badan Peradilan adalah Kekuasaan Negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya. Diantaranya adalah Badan Peradilan Umum yang pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan salah satu bagian dari Pengadilan Tinggi Papua Barat. Seiring dengan pemekaran Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat maka Pengadilan Negeri Fakfak harus segera melakukan Kebijakan Strategis, Peningkatan Kinerja, Pembenahan Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Anggaran maupun Pembangunan Infrastruktur pada Pengadilan Negeri Fakfak mengingat secara geografis sangat berbeda dengan daerah lain sehingga harus didukung dengan sarana transportasi udara yang sangat Dominan digunakan yang mengakibatkan biaya tinggi.

Adapun Pengadilan Negeri Fakfak berada dibagian Provinsi Papua Barat dan berkedudukan di Jalan Yos Sudarso nomor 92 Fakfak Papua Barat. Dengan Wilayah Hukum mencakup keseluruhan Kabupaten Fakfak.

B. VISI DAN MISI.

1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Fakfak adalah :

“Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung”.

2. MISI

PENGADILAN NEGERI FAKFAK mengemban Misi :

- MENJAGA INTEGRITAS DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.
- MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.
- MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.
- MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.

3. MOTTO

Pengadilan Negeri Fakfak Klas II memiliki Motto:

“ BISA TERBINA”.

BERWIBAWA INTEGRITAS SANTUN ADIL TERTIB BERSIH

INOVATIF AMANAH

4. KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Fakfak adalah pernyataan komitmen pimpinan untuk memastikan bahwa proses implementasi sistem

manajemen mutu di Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan sasaran mutu organisasi, serta memenuhi persyaratan mutu dan berupaya secara berkelanjutan memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu.

Kebijakan manajemen Mutu Pengadilan Negeri Fakfak :

1. Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2. Memberikan Kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan negeri Fakfak.
5. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengadilan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

C. RENCANA STRATEGIS.

Sebagai implikasi dari Visi dan Misi tersebut di atas, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang bermuatan kebijakan strategis , kebijaksanaan, program kerja dan kegiatan tahunan yang disusun dan ditata secara sistimatis, terarah dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan faktor internal maupun eksternal organisasi yang nantinya sebagai acuan dan pedoman kerja maupun sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan – kegiatan yang sudah terlaksana guna peryempurnaan program selanjutnya agar tepat guna dan tepat sasaran.

Sesuai dengan tuntutan publik terkait dengan Supremasi hukum maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Fakfak, perlu adanya suatu Rencana Strategis yang baik sebagai kerangka acuan

untuk mewujudkan cita – cita hukum yang merupakan tuntutan masyarakat dimaksud terkait dengan kemandirian hukum dan keadilan , penegakan supremasi hukum , proses peradilan yang cepat , sederhana dan dengan biaya ringan. Dimana Rencana Strategi ini, hal yang sifatnya fundamental dan perlu mendapat perhatian adalah perkembangan Hukum dan kondisi masyarakat Fakfak.

Kondisi internal dari Pengadilan Negeri Fakfak maupun kondisi perkembangan Hukum dan masyarakat secara nasional. Selain itu, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak berisikan kajian kegiatan secara sistematik yang terakumulasi dalam tahapan kegiatan tahunan yang terinci dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pengadilan meliputi:

A. Tujuan Pengadilan Negeri Fakfak

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum)
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik para pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang Profesional.

B. Sasaran Strategis

Adapun Penjabaran dari tujuan terukur, yaitu semua yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.

3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Acces to Justice*).
6. Meningkatnya kualitas Pengawasan.
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Fakfak.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Fakfak.

2

BAB II PENYELESAIAN PERKARA

A.Keadaan Perkara

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Negeri Fakfak yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka selama tahun 2023 baik Perkara Perdata maupun Perkara Pidana yang diproses di Pengadilan Negeri Fakfak dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Keadaan Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Perkara pidana tahun 2023

No	Jenis Perkara	Perkara Pidana			Ket
		Masuk	Putus	Sisa	
1.	Perkara Pidana Biasa	56	54	2	
2.	Perkara Pidana Anak	3	3	-	
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	167	167	-	
4.	Pra Peradilan (Prapid)	1	1	-	
5.	Penyitaan	140	140	-	
6.	Pengeledahan	14	14	-	

❖ Perkara perdata tahun 2023

No	Jenis Perkara	Perkara Perdata				Ket
		Masuk	Putus	Cabut	Sisa	
1.	Perkara Perdata Gugatan	8	8	1	-	
2.	Perkara Perdata Permohonan	63	63	3	-	
3.	Perkara Gugatan Sederhana	3	3	-	-	
4.	Gugatan /Bantahan	-	-	-	-	

2. Perkara tingkat Banding

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding
1.	Perkara tingkat Banding	2	18	20	20

3. Perkara tingkat Kasasi

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1.	Perkara tingkat Kasasi	-	6	6	6

4. Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum
1.	Perkara tingkat Peninjauan Kembali	-	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara**1. Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pengadilan Negeri Fakfak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima dan memutus perkara dalam wilayah yurisdiksinya.

a. Perkara Pidana**- Rekapitulasi keadaan perkara pidana tahun 2023**

No	Jenis Perkara	Perkara Pidana				Ket
		Sisa 2022	Masuk	Putus	Sisa	
1.	Perkara Pidana Biasa	3	56	54	2	
2.	Perkara Pidana Anak	-	3	3	-	
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	-	167	167	-	
4.	Pra Peradilan (Prapid)	-	-	-	-	
5.	Penyitaan	-	-	-	-	
6.	Pengeledahan	-	-	-	-	

b. Perkara perdata**- Rekapitulasi perkara perdata tahun 2023**

No	Jenis Perkara	Perkara Pidana					Ket
		Sisa 2022	Masuk	Putus	Cabut	Sisa	
1.	Perkara Perdata Gugatan	2	8	9	1	-	
2.	Perkara Perdata Permohonan	1	63	64	3	-	
3.	Perkara Gugatan Sederhana	-	3	2	1	-	
4.	Gugatan /Bantahan	-	-	-	-	-	

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023	Perkara yang diputus tepat Waktu Tahun 2023
1.	Perkara Pidana	59	57
2.	Perkara Perdata	74	74

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		Perdata	Pidana	Jumlah	
1.	Putusan Perkara:				
	- Banding	72	41	113	113
	- Kasasi	74	53	127	127
	- PK	74	59	133	133

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2023	Jumlah Perkara yang berhasil Mediasi Tahun 2023
1.	Perkara Perdata	6	2

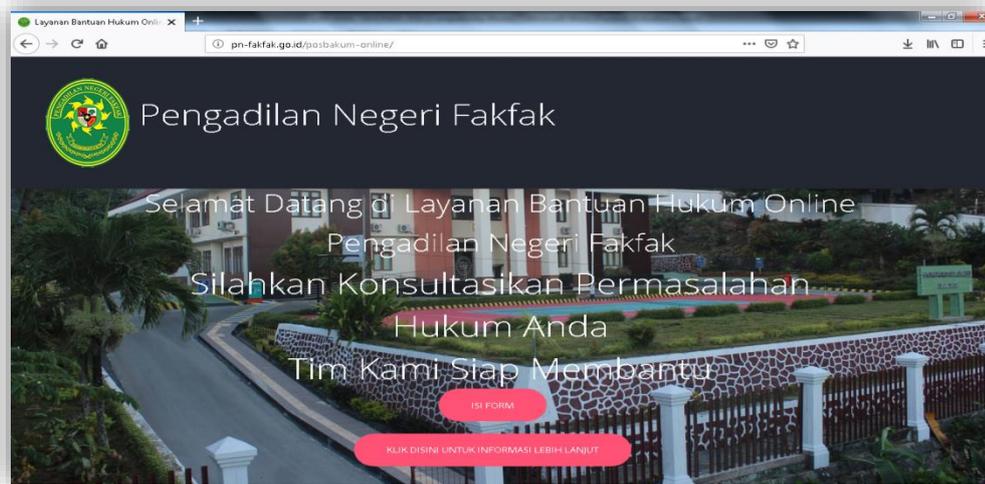
5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversifikasi

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2023	Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversifikasi Tahun 2023
1.	Perkara Pidana	-	-

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)**1. Posbakum**

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum. Dalam tahun Anggaran 2023, dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk setiap bulannya dengan 2 jam kerja, dengan penyerapan anggaran mencapai **100%**. Pada awal tahun 2023 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan/ MOU dari pihak Pengadilan Negeri Fakfak dan Pihak Advokad untuk mendukung dan mensukseskan layanan tersebut.

Dan sebagai inovasi, Pengadilan Negeri Fakfak menampilkan Layanan Pos Bantuan Hukum Online yang dapat diakses melalui website pn-fakfak.go.id, yang merupakan hasil Aktualisasi dan Habitiasi dari Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan Layanan Bantuan Hukum Online pada Website Pengadilan Negeri Fakfak

Untuk mendukung kegiatan Pos Bantuan Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menyediakan akses informasi berupa selebaran/flyer, banner serta jadwal

dan foto dari Petugas piket Pos Bantuan Hukum untuk menginformasikan tentang fasilitas tersebut kepada para pencari keadilan dan pengguna Layanan Publik pada Pengadilan Negeri



Fakfak.

2. Sidang keliling / Pelayanan Terpadu

Sesuai dengan Misi Pengadilan Negeri Fakfak yaitu memberikan Pelayanan Hukum yang inovatif dan berkeadilan kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Fakfak pada Tahun 2023 tidak melaksanakan kegiatan Sidang Keliling pelayanan terpadu.

3. Perkara prodeo

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapat alokasi Anggaran untuk Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

3

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sehingga perlu dipacu dan didorong lewat pendidikan dan pelatihan secara simultan. Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2023 sebanyak: 19 (sembilan belas) orang pegawai dan 11 (sebelas) tenaga honorer.

Tabel III.1. Data Pegawai

No	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Ketua : Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum	IV/b	
2	Wakil Ketua :		
3	Hakim : 1. Reynold S.E.M.P Nababan, S.H. 2. Iranda Careca Anindityo, S.H. 3. Ganjar Prima Anggara, S.H. 4. Ivan Bhakti Yudistira, S.H. 5. Yahya Muhaymin Hatta, S.H	III/b III/b III/b III/b III/b	
4	Panitera Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.	III/d	
5	Panitera Muda Perdata - Staf : Yulian Riski Ananda, A.Md.A.B	II/c	
6	Panitera Muda Pidana Selmiati Lame Paintu, S.H., M.H Staf : Irianto Tanggahma, S.H Muh. Yusril Nasrum, S.H.	III/d III/a III/a	
7	Panitera Muda Hukum Salmuna	III/b	
8	Panitera Pengganti -	-	-
9	Jurusita / Jurusita Pengganti 1. Ismet Wairoy, S.H. 2. Randy Marchell Sohilat 3. Johanis M. Rahadat	III/b II/d II/c	Diperbantukan di Bagian Pidana Diperbantukan di Bagian Perdata Diperbantukan di Bagian Hukum

No	TENAGA NON TEKNIS	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Sekretaris : Yurice J.C Rembet, S.T	(III/d)	
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana : -		
3	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : -		
4	Kasubag Umum dan Keuangan : Rizal Asbar, S.H. Staf : 1. Muhammad Resky Ridwan, A.Md.A.B	(III/b) (II/c)	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran Diperbantukan sebagai Penerima Data PNB

Tabel III.2. Data Tenaga Honorer

No	TENAGA HONORER	T. M. T.	KETERANGAN
1.	Thomas Wiratraur, S.H.	02 – 01 – 2007 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
2.	Asri Wali, S.H.I.	02 – 01 – 2008 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
3.	Oktoviana. T. Watto, S.H	03 – 03 – 2011 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Kepegawaian.
4.	La Wandy	11 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Kepegawaian
5.	Yeni Anggraini, S.Sos.	12 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Perdata.
6.	Robertho. R. Tawirasaru, S.H.	12 – 03 - 2014 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Pidana.
7.	Ratna Keley, A.Md.	05 – 01 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
8.	Rika Mustika Sari, S.H.	01 – 10 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
9.	Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H	29 – 03 – 2021 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Hukum
10.	Juniar Patimbang, A.Md	28 – 06 – 2021 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Ortala
11.	Ade Renaldi, A.Md	03 – 01 – 2023 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian PTIP

Tabel III.3. Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Kebutuhan	Yang Ada	Kekurangan
1.	Staf Kepaniteraan Pidana	4	2	2
2.	Staf Kepaniteraan Perdata	4	1	3
3.	Staf Kepaniteraan Hukum	4	1	3
4.	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	4	0	4
5.	Staf Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana	2	0	2
6.	Staf Subbag Umum dan Keuangan	4	1	3
7.	Fungsional Arsiparis	2	0	2
8.	Fungsional Pustakawan	2	0	2
9.	Fungsional Pranata komputer	2	0	2
10.	Fungsional Bendahara	2	0	2
11.	Jurusita / Jurusita Pengganti	3	3	0
12.	Panitera Pengganti	2	0	2
13.	Panitera Muda Pidana	1	1	0
14.	Panitera Muda Perdata	1	0	1
15.	Panitera Muda Hukum	1	1	0
16.	Kasubag Umum dan Keuangan	1	1	0
17.	Kasubag Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana	1	0	1
18.	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	0	1
19.	Sekretaris	1	1	0
20.	Panitera	1	1	0
21.	Hakim	5	5	0
22.	Wakil Ketua	1	0	1
23.	Ketua	1	1	0

1. Mutasi

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional maupun Nasional.

Tabel III.4. Mutasi Masuk Tahun 2023

No	Nama	Jabatan Baru	Jabatan Lama	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	Yahya Muhaymin Hatta, S.H	Hakim Pengadilan Negeri Fakfak	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	2457/DJU/SK/KP.04.5/XI/2022 11 November 2022	16 Januari 2023
2.	Selmiati Lame Paintu, S.H., M.H	Panitera Muda Khusus Perikanan Pengadilan Negeri Sorong	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Fakfak	1331/DJU/SK/KP.05.5/IV/2023 17 April 2023	6 Juni 2023
3.	Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Timika	Panitera Pengadilan Negeri Fakfak	1331/DJU/SK/KP.04.5/IV/2023 17 April 2023	26 Juni 2023

Tabel III.5. Mutasi Keluar Tahun 2023

No	Nama	Jabatan Baru	Jabatan Lama	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	Engelbertha Turot, S.H.	Analisis Tatalaksana Pengadilan Negeri Sorong	Analisis Tatalaksana Pengadilan Negeri Fakfak	W31-U/68/KPT/SK/IV/2023 17 April 2023	17 April 2023
2.	Adolfina Durian, S.Kom	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda	Panitera Muda Perdata	1881/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 27 November 2023	27 November 2023

2. Promosi

Selain itu mutasi diartikan pula sebagai promosi yang dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengalaman, kejujuran serta syarat-syarat objektif lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS).

Tabel III.6. Promosi Naik Pangkat

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Pangkat/Golongan Baru	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1	Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum / IV/a / 197703312002121004	IV/b / Pembina Tk.I	183/DJU/SK/KP.04.1/II/2023 8 Maret 2023	1 April 2023
2.	Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. / III/c / 198707122011012022	III/d / Penata Tk.I	W31-U/169.KP.04.1/III/2023 1 Maret 2023	1 April 2023
3.	La Idu / III/b / 196508151993031003	III/c / Penata	W31-U/170/KP.04.1/III/2023 1 Maret 2023	1 April 2023
4.	Engelbertha Turot, S.H. / III/a / 198601262019032005	III/a / Penata Muda	W31-U/120/KP.04.1/II/2023 16 Februari 2023	1 April 2023
5.	Ismet Wairoy / III/a / 197208142001121002	III/b / Penata Muda Tk.I	1562/DJU/SK/KP.04.1/VII/2023 17 Juli 2023	1 Oktober 2023

Tabel III.7. Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan Baru	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	YURICE J.C. REMBET S.T	III/d	W30.U6/1071/KP.04.02/XII/20 22 5 Desember 2023	1/01/2023
2	LA IDU	III/c	W31.U3/49/KP.04.2/II/2023 10 Januari 2023	1/03/2023
3	ENGELBERTHA TUROT, S.H	III/b	W31.U3/50/KP.04.2/II/2023 10 Januari 2023	1/03/2023
4	ADOLFINA DURIAN, S.Kom	III/d	W31.U3/286/KP.04.2/III/2023 7 Maret 2023	1/04/2023
5	REYNOLD S.E.M.P NABABAN, S.H	III/b	W31.U3/912/KP2.1.2/X/2023 16 Oktober 2023	1/12/2023
6	IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H	III/b	W31.U3/913/KP2.1.2/X/2023 16 Oktober 2023	1/12/2023
7	GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.	III/b	W31.U3/914/KP2.1.2/X/2023 16 Oktober 2023	1/12/2023
8	IVAN BHAKTI YUDISTIRA, S.H	III/b	W31.U3/915/KP2.1.2/X/2023 16 Oktober 2023	1/12/2023
9	YAHYA MUHAYMIN HATTA, S.H	III/b	W31.U3/916/KP2.1.2/X/2023 16 Oktober 2023	1/12/2023

3. Pensiun

Dalam Tahun 2023 ada Aparatur yang memasuki masa Purnabakti/Pensiun dari Kesekretariatan.

No	Nama/NIP	Pangkat	Jabatan	Nomor SK
1.	La Idu	III/c	Kasubag Kepegawaian Organisasi & Tatalaksana	00319/13001/AZ/05/23

4 Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Selama tahun 2023 pegawai yang mengikuti Diklat Pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai Berikut:

Tabel III.8. Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Uji Publik dan Knowledge Sharing Buku Saku SIPP-EIS	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Hotel Grand Mercure Harmoni, Kota Jakarta Pusat Tanggal 6 Maret s/d 9 Maret 2023	Ganjar Prima Anggara, S.H.
2	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat Tanggal 26 Maret s/d 1 April 2023	Iranda Careca Anindityo, S.H.
3	Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting : Tanggal 10 April s/d 18 April 2023 Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat Tanggal 1 s/d 16 Mei 2023	Dony hardiyanto, S.H., M.Hum.
4	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Balai Diklat PKN Sulawesi Selatan BPK RI Tanggal 22 Mei s/d 26 Mei 2023	Yurice J.C. Rembet, S.T.
5	Pembinaan Teknis Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat, Manokwari	Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum
6	Pembinaan Teknis Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat, Manokwari	Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.
7	Pembinaan Teknis Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat, Manokwari	Yurice J.C. Rembet, S.T.

8	Pembinaan Teknis Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Pengadilan Tinggi Papua Barat, Manokwari	Iranda Careca Anindityo, S.H.
9	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Pembelajaran Online : 11 s/d 22 September 2023, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Tanggal 24 September s/d 29 September 2023	Yurice J.C Rembet, S.T.
10	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Pembelajaran Online : 11 s/d 22 September 2023, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Tanggal 24 September s/d 29 September 2023	Randy Machell Sohilaht
11	Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Aston Niu Manokwari, Papua Barat Tanggal 18 desember s/d 20 Desember 2023	Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum
12	Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Aston Niu Manokwari, Papua Barat Tanggal 18 desember s/d 20 Desember 2023	Yurice J.C. Rembet, S.T.
13	Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Aston Niu Manokwari, Papua Barat Tanggal 18 desember s/d 20 Desember 2023	Iranda Careca Anindityo, S.H.
14	Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Aston Niu Manokwari, Papua Barat Tanggal 18 desember s/d 20 Desember 2023	Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.
15	Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Aston Niu Manokwari, Papua Barat Tanggal 18 desember s/d 20 Desember 2023	Rizal Asbar, S.H.
16	Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Aston Niu Manokwari, Papua Barat Tanggal 18 desember s/d 20 Desember 2023	Muhammad Resky Ridwan, A.Md., A.B.

4

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum, pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Fakfak mengelola 2 (Dua) DIPA, yakni:

Pertama DIPA yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Mendapat alokasi anggaran Belanja Pegawai dan belanja Barang dan Belanja modal diawal tahun 2023 dengan total anggaran sebesar **Rp. 5.747.820.000,-** (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), dan diakhir tahun 2023 menjadi **Rp. 5.000.820.000,-** (*Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Dalam kurun waktu tahun 2023 telah melakukan 6 (Enam) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 15 Februari 2023, perubahan RPD;
2. Revisi Kedua tanggal 14 April 2023, perubahan RPD;
3. Revisi Ketiga tanggal 6 Juli 2023, perubahan RPD
4. Revisi Keempat tanggal 23 Oktober 2023 Pergeseran Dana perubahan Pagu Anggaran Eselon I ;
5. Revisi Kelima tanggal 30 November 2023, perubahan halaman III;
6. Revisi Keenam tanggal 12 Desember 2023, perubahan halaman III dan pemutakhiran data POK atas persetujuan Eselon I

Kedua, DIPA yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dengan dapat alokasi anggaran Belanja Barang dengan total anggaran sebesar **Rp 75.200.000,-** (*Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Dalam kurun waktu tahun 2023 telah melakukan 4 (empat) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 15 Februari 2023, perubahan RPD;
2. Revisi Kedua tanggal 14 April 2023, perubahan RPD
3. Revisi Ketiga 11 Juli 2023, perubahan RPD

4. Revisi Keempat 23 November 2023, perubahan RPD, pemutakhiran data POK

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pengelolaan Keuangan Pada DIPA 01 untuk Tahun 2023 dari Pagu sebesar **Rp. 5.000.249.000,-** (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan Anggaran **Rp. 4.820.356.664,-** dengan persentase sebesar **96.35%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2023 telah melakukan 4 (Empat) kali revisi dari Kanwil DJPB dan DJA.

Pengelolaan dan penyerapan/ realisasi pada masing – masing akun belanja dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2023 Pagu awal sebesar **Rp.2.611.764.000,-** Penyerapan belanja Pegawai sampai akhir 2023 adalah sebesar Rp. 2.431.912.385,- dengan persentase sebesar **93.11%**.

Tabel IV.1. Realisasi Belanja Pegawai

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	884,970,000.	826,496,420.	93.39	58,473,580.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000.	13,228.	94.49	775.
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	73,053,000.	66,457,710.	90.97	6,595,290.
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	19,662,000.	17,593,772.	89.48	2,068,228.
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	21,820,000.	19,320,000.	88.54	2,500,000.
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	932,705,000.	868,840,000.	93.15	63,865,000.
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	122,834,000.	112,715,275.	91.76	10,118,725.
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	60,958,000.	55,377,980.	90.85	5,580,020.
511129	Belanja Uang Makan PNS	145,510,000.	144,598,000.	99.37	912,000.
511138	Belanja tunjangan Khusus Papua PNS	154,825,000.	140,265,000.	90.6	14,560,000.
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,965,000.	12,235,000.	94.37	730,000.
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	182,448,000.	168,000,000.	92.08	14,448,000.
Jumlah		2,611,764,000.	2,431,912,385.	93.11	179,851,618.

b. Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2023 pagu awal sebesar Rp.2.322.985.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 2.314.138.279,- yang merupakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Realisasi penyerapan belanja barang sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar **100%**.

Tabel IV.2. Realisasi Belanja Barang Non Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,806,000	8,806,000	100	0
JUMLAH		8,806,000	8,806,000	100	0

Tabel IV.3. Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	784,471,000	784,467,970	100	3,030
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	30,000,000	100	0
521115	Belanja Honor Terkait Oprasioanal Satuan Kerja	66,348,000	66,348,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,680,000	20,680,000	100	0
522112	Beban Langganan Telpon	1,140,000	1,103,28	96.78	36,716
522113	Beban Langganan Air	12,000,000	12,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	5,090,000	5,090,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	720,000	720,000	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	905,343,000	905,343,000	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya	66,483,000	66,482,025	100	975
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	155,837,000	155,837,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	202,800,000	202,800,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	2,400,000	100	0
JUMLAH		2.322.985.000	2.322.944.279	100	0

c. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2023 sebesar **Rp 65.500.000,-** yang merupakan pengadaan Sarana Pendukung Disabilitas sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar **100%**.

Tabel IV.4. Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000	5.500.000	100	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	60.000.000	60.000.000	100	0
JUMLAH		65.500.000	65.500.000	100	0

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 adalah Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan dialokasikan untuk keperluan Belanja Barang selama setahun yang mendukung kinerja peradilan dan aparatur yang bekerja didalamnya dalam bidang perkara. Adapun tahun 2023 dialokasikan dana dengan total anggaran sebesar **Rp 75.200.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**. Dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp 75.199.045,-** Dan persentase penyerapan sebesar **100%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2023 telah melakukan 4 (Empat) kali revisi dari Kanwil DJPB.

Rincian Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2023 untuk Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5. Realisasi Belanja DIPA 03

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
Pos Pelayanan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100	0

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan banding yang tepat waktu					
521211	Belanja Pengadaan dan Penjilidan Berkas Perkara	4.900.000	4.900.000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.850.000	8.850.000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	3.920.000	3.920.000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penetapan Hari Sidang	3.710.000	3.710.000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat penahanan dan perpanjangan penahanan	2.870.000	2.870.000	100	0
521211	Belanja Bahan Pemeriksaan DI Pengadilan	5.550.000	5.550.000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan	1.270.000	1.270.000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan	3.500.000	3.500.000	100	0
521211	Pengadaan dan Penjilidan berkas perkara Minutasi	4.900.000	4.900.000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan Banding	1.881.000	1.880.460	99,97	540
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan Banding Jaksa/ Terdakwa	700.000	700.000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan Kasasi dan PK	1.249.000	1.248.585	99,97	415
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan Kasasi dan PK	700.000	700.000	100	0
JUMLAH		75.200.000	75.200.000	100	0

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Fakfak merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Fakfak selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sorong secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Negeri Fakfak melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai pagu anggaran sebesar **Rp. 14,306,000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)**. Dari pagu tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.6 Daftar Pengadaan Sarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	Rp. 1.500,000,-
2.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Kursi Roda	Rp. 4.000,000,-
3.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Meja Kerja Kayu	Rp. 5.641,500,-
4.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Kursi Besi/Metal	Rp. 2.164,500,-
5.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Alat Kesehatan Rehabilitasi	Rp. 1.000,000,-
Total Nilai		Rp. 14.306,000,-

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Tanah dan Gedung Kantor						
1.	Tanah Bangunan Gedung Kantor	1	√			
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	√			
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			
4.	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	√			
5.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	√			
6.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	√			
7.	Bangunan Penampung Air Baku	1	√			
8.	Pagar Permanen	1	√			

b. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Rumah Dinas						
1.	Rumah Dinas Ketua	1		√		Aset Pemda
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			Renovasi Tahun 2013
3.	Rumah Dinas Hakim	7	3	-	4	Butuh Di renovasi
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			Renovasi Tahun 2013
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	-	√	Butuh Di Renovasi

c. Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Inova	2007	√			
2	Kijang Grend Toyota	1991			√	
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda	2002		√		

d. Sarana dan Prasarana Lainnya

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	*KETERANGAN
I	Sarana/ Prasarana Ruangan		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil	1	Baik
3.	Ruang Hakim	1	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6.	Ruang Register	1	Baik
7.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Baik
8.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Baik
9.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
10.	Ruang Juru Sita	1	Baik
11.	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
12.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
13.	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
14.	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
15.	Ruang Perencanaan Tehnik Informasi dan Pelaporan	1	Baik
16.	Ruang Sidang Utama (Cendrawasih)	1	Baik
17.	Ruang Sidang Kedua (Kasuari)	1	Baik
18.	Ruang Sidang Anak	1	Baik
19.	Ruang Tahanan (Pria/ Wanita)	2	Baik
20.	Ruang Mediasi	1	Baik
21.	Ruang Arsip	1	Baik
22.	Ruang Laktasi dan Kesehatan	1	Baik
23.	Ruang Mushola	1	Baik
24.	Ruang Humas	1	Baik
25.	Ruang Jaksa	1	Baik
26.	Ruang Posbakum	1	Baik
27.	Ruang Pantri	2	Baik
28.	Ruang Bendahara	1	Baik
29.	Ruang Server	1	Baik
30.	Ruang Penyimpanan Dokumen	1	Baik
31.	Ruang Kasir Perdata	1	Baik
32.	Ruang Bapas, Pengacara dan Pekerja Sosial	1	Baik
33.	Ruang WC Umum	4	Baik
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Meja reseptionis	1	Baik
2.	Scanner	2	Baik
3.	Server	1	Baik
4.	Mesin Ketik portable	27	Rusak ringan2 rusak berat 25
5.	Mesin Hitung Listrik	1	Rusak Berat
6.	Portabel Genset	1	Baik
7.	Lemari Penyimpan	7	1 rusak berat ; 6 Baik
8.	Mesin Stensil	5	5 Rusak berat
9.	Lemari Besi/ Metal	28	22 Rusak Berat; 6 baik
10.	Lemari Kayu	24	12 Rusak Ringan; 12 Baik
11.	Rak Kayu	15	15 baik
12.	Filling Cabinet Besi	14	3 rusak berat; 5 baik, 6 Rusak Ringan
13.	Brankas	5	1 Rusak Ringan; 4 Baik
14.	Lemari Display	1	Baik
15.	Lemari Katalog	1	Baik

16.	Papan Visual	21	8 Rusak Ringan; 13 Baik
17.	Buffet	2	Baik
18.	Hand Metal Detector	1	Baik
19.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Baik
20.	Meja Kerja Besi/Metal	57	20 Rusak Ringan ,22 Baik, 15 Rusak Berat
21.	Meja Kerja Kayu	96	9 rusak berat; 87 Baik
22.	Kursi Besi/metal	226	19 Rusak Ringan; 161 Baik, 46 Rusak Berat
23.	Kursi Kayu	23	19 Baik ,4 Rusak Berat
24.	Sice	19	1 Rusak Berat; 18 Baik
25.	Bangku Panjang Besi/metal	36	36 Baik
26.	Bangku Panjang Kayu	50	22 Rusak Ringan, 28 Baik
27.	Meja Rapat	5	Baik
28.	Meja Komputer	4	Baik
29.	Sketsel (Pagar Ruang Sidang)	1	Baik
30.	Kursi Fiber Glas/plastik	4	Baik
31.	Pot Bunga	9	9 rusak berat
32.	Jam Mekanis	10	5 Rusak Rerat, 5 Rusak Ringan
33.	Mesin Pemotong Rumput	2	2 Rusak Berat
34.	Iemari Es	2	2 Rusak Berat
35.	A.c.split	17	17 baik
36.	Kipas Angin	36	2 Baik, 34 Rusak Berat
37.	Televisi	5	Baik
38.	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
39.	Tiang Bendera	6	Baik
40.	Kaca Hias	1	Baik
41.	Dispenser	2	Rusak berat
42.	Palu Sidang	2	Baik
43.	Gordyin/Kray	66	66 rusak berat
44.	Dvd Player	1	Rusak Berat
45.	Compact Disc player (peralatan Studio Audio)	1	Baik
46.	Professional Sound system	1	Baik
47.	Telephone (pabx)	3	1 Baik,2 Rusak Berat
48.	pesawat Telephone	6	6 Rusak Berat
49.	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1 Rusak Berat
50.	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	1 Baik
51.	P.c Unit	24	18 Baik, 6 Rusak Berat
52.	Lap Top	10	8 Baik, 2 Rusak Berat
53.	Note Book	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
54.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	10 Baik
55.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
56.	Portable Air Conditioning (ac)	3	Baik
57.	Instalasi ac	4	4 Rusak Berat
58.	Monografi	15	Baik
59.	Piala	8	Rusak Berat
60.	Piagam	1	Rusak Berat
61.	Mesin Hitung manual	1	Rusak Berat
62.	Papan Pengumuman	1	Baik
63.	Stabilisator	2	Baik
64.	Lambang Instansi	1	Baik
65.	Kursi Dorong	3	Baik
66.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik
67.	Router	1	Baik
68.	Air Conditioning (ac)	2	Baik

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.943 m² senilai Rp. 250.892.000,- (Dua ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (Rumah Dinas) 11 Unit , 747 m² Senilai Rp. 66.483.000.- (Enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 169.112.000 (Seratus enam puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Negeri Fakfak yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke KPKNL untuk dilakukan penghapusan.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Fakfak bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Negeri Fakfak telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di

alamat www.pn-fakfak.go.id. Dalam website ini Pengadilan Negeri Fakfak menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Fakfak baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya. Adapun perkembangan dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan peradilan selanjutnya adalah adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan aplikasi e-court.

1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Fakfak

E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online . Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut: Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM), Dokumen Persidangan, Pemanggilan Elektronik (e-Summons), Link E-Court Mahkamah Agung RI e-court

Layanan e-court ini merupakan layanan baru yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dan diterapkan diseluruh jajaran pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Fakfak. Dalam pengimplemetasiannya layanan e-court pada Pengadilan Negeri Fakfak menggunakan perangkat teknologi informasi dan alat pengolah data untuk mendukung pengoperasian layanan e-court di Pengadilan Negeri Fakfak yaitu:

Tabel IV.7 Perangkat pendukung e-court

PERANGKAT PENDUKUNG E-COURT			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
P.C. Unit	HP AIO PROONE 600 G5 (I5, 4GB,1 TB, WIN10,21.5IN)	4	Unit
UPS P.C. Unit	APC Back-UPS BX 1400U-MS	4	Unit
Server	Fujitsu TX1330M4 (Intel Xeon E-2134,32GB, 2x, 1TB)	1	Unit
Rak Server		1	Unit
E-court corner	Vestouch InteractiveAndroid Kiosk 21,5 inch	1	Unit

Tahun 2023, Pengadilan Negeri Fakfak menerima 36 pengguna Layanan e-court, berikut Implementasi Layanan e-court yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Fakfak:

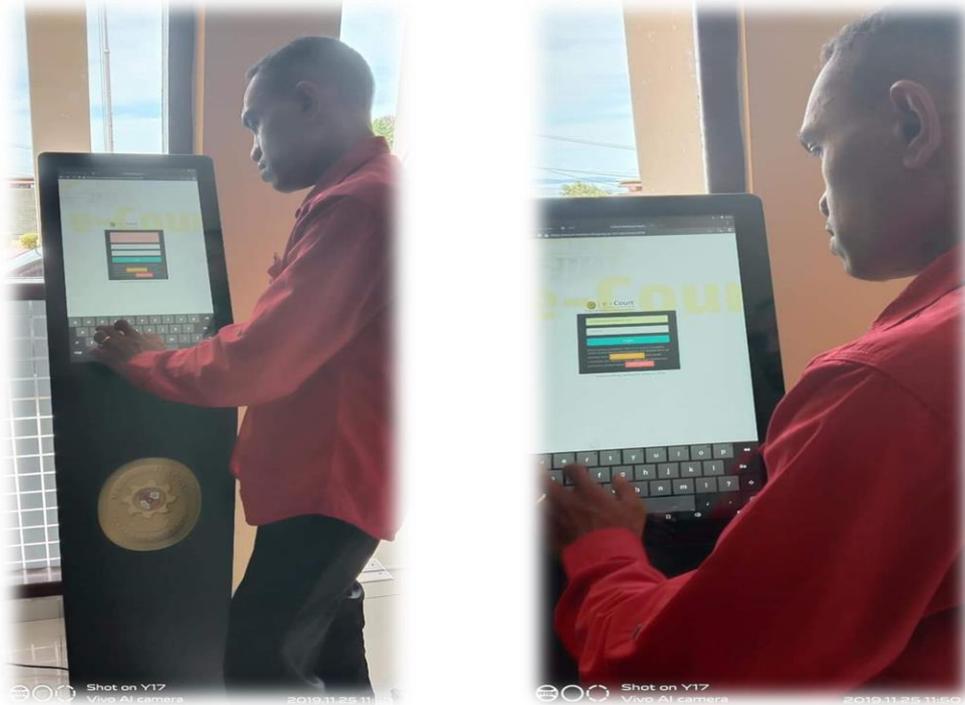
Tabel Perkara Pengguna e-court Pengadilan Negeri Fakfak

DAFTAR PERKARA ECOURT		
No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Gugatan	8
2.	Gugatan Sederhana	3
3.	Permohonan	63
4.	e-Litigasi	3

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN FFK-11202115V 27 November 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 892.000	15/Pdt.G/2021/PN Ffk 1 Desember 2021
2	PN FFK-11202115W5 9 November 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 392.000	14/Pdt.G/2021/PN Ffk 9 November 2021
3	PN FFK-0820211TPE 26 Agustus 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 392.000	13/Pdt.G/2021/PN Ffk 27 Agustus 2021
4	PN FFK-0720211MGR 30 Juli 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 392.000	11/Pdt.G/2021/PN Ffk 30 Juli 2021
5	PN FFK-0720212HI 28 Juli 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 25 Agustus 2021	Rp. 892.000	10/Pdt.G/2021/PN Ffk 29 Juli 2021
6	PN FFK-0720211RNO 2 Juli 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terddaftar - Putusan Tanggal Putusan : 17	Rp. 892.000	8/Pdt.G/2021/PN Ffk 6 Juli 2021

No.	Atr	Deskripsi Dokumen	Keterangan	Status
1	Kartu Tanda Anggota	Kartu Tanda Anggota	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
2	Berita Acara Penyempahan	Berita Acara Penyempahan	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
3	KTP	KTP	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
4	Surat Kuasa Paulus Tan	Surat Kuasa Paulus Tan	-	✓
5	Dokumen Gugatan	Dokumen Gugatan	-	✓
6	Dokumen Bukti	Dokumen Bukti	-	✓
7	Jawaban Tergugat	Jawaban Tergugat	Dokumen Sudah Diverifikasi Majelis/Hakim	✓
8	Replik Paulus Tan	Replik Paulus Tan	Dokumen Sudah Diverifikasi Majelis/Hakim	✓

Tampilan Detail Pendaftaran/dokumen Persidangan e-court Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Implementasi Layanan e-court corner

Tampilan salah satu Advokat yang menggunakan perangkat baru layanan e-court corner Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Implementasi Pengenalan ecourt pada pengunjung pengadilan

Menampilkan video pengenalan dan penelasan tentang e-court di ruang tunggu Pengadilan Negeri Fakfak

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Fakfak

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Aplikasi SIPP ini secara terus menerus disempurnakan, dimana aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu **versi 5.3.1** Perangkat teknologi informasi dan alat pengolah data untuk mendukung pengoperasian aplikasi SIPP di Pengadilan Negeri Fakfak yaitu :

Tabel IV.7 Perangkat pendukung SIPP

Perangkat Pendukung SIPP			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server	Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb	1	Unit
	2x 4GB DR3-1600 ECC		
	Independent Mode Installation		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	2x 300GB SAS ^G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
Aplikasi SIPP	Versi 5.3.1	1	Aplikasi

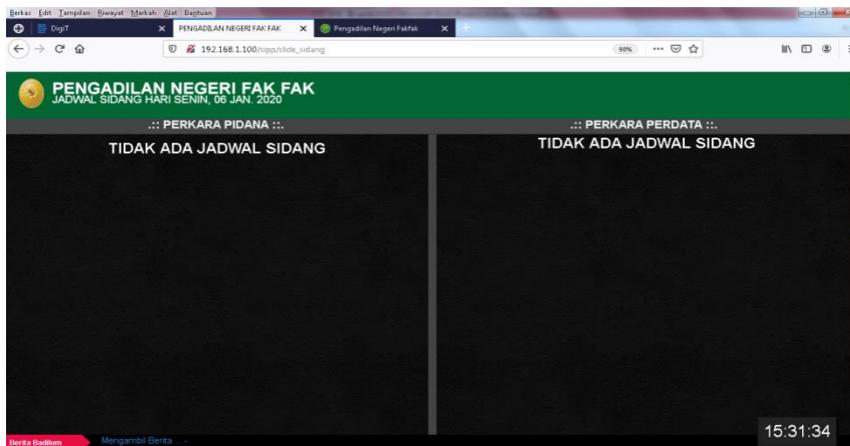
Pengadilan Negeri Fakfak memiliki Website dengan alamat :www.pn-fakfak.go.id dalam halaman website tersebut ditampilkan informasi-informasi

terkait Pengadilan Negeri Fakfak sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan Informasi kepada pencari informasi tanpa harus datang langsung. Untuk penelusuran Perkara / pencarian informasi perkara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Fakfak, masyarakat juga dapat mengaksesnya pada website Pengadilan Negeri Fakfak, melalui Menu INFO PERKARA, sedangkan untuk mencari Jadwal sidang pada Menu JADWAL SIDANG.

Berikut tampilan-tampilan Menu pada Website dan Implementasi SIPP di Website Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan Menu Jadwal Sidang Online pada Website Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Menu Jadwal Sidang , pada TV/LCD lobby Pengadilan Negeri Fakfak

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Perbaikan Data : Jumat, 07 Jan, 2022 14:13:29 WIT, Total : 4.063 Perkara

DATA SELURUH PERKARA

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1/PidLP/2022/PN Fk	07 Jan 2022	Lain-Lain	Pemohon: MARTEN ECA MADMUAR	Pendaftaran Perkara	2 Hari	[detail]
2	74/Pid.Sus/2021/PN Fk	02 Dec 2021	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penuntut Umum: Petra Wanda, S.H. Terdakwa: TELMA SUTELA	Persidangan	38 Hari	[detail]
3	75/Pid.B/2021/PN Fk	02 Dec 2021	Penganiayaan	Penuntut Umum: MARIA P.O. LIMASELLA, SH Terdakwa: OSCAR FEBRIAN WERIPANG	Tuntutan	38 Hari	[detail]
4	76/Pid.B/2021/PN Fk	02 Dec 2021	Penggelapan	Penuntut Umum: GAMALIEL GINTING, S.H. Terdakwa: HASBI RAHANYAMTEL	Persidangan	38 Hari	[detail]
5	77/Pid.B/2021/PN Fk	02 Dec 2021	Pencurian	Penuntut Umum: GAMALIEL GINTING, S.H.	Tuntutan	38 Hari	[detail]

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Tampilan Menu Penelusuran Perkara pada Meja Informasi Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Peta SIPP pada Website Pengadilan Negeri Fakfak Pada Awal Tahun

5

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dimulai dari Tahun 2016, Pengadilan Negeri Fakfak mencoba melakukan perubahan pola pikir aparatur dalam bidang Standar Pelayanan Publik dan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Fakfak. Perubahan baik didalam dan luar gedung Pengadilan Negeri Fakfak dan inovasi-inovasi pelayana publik direncanakan dan dilakukan. Seiring dengan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Fakfak untuk mendukung visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama dalam hal mutu pelayanan pengadilan.



Dengan sangat membanggakan Pengadilan Negeri Fakfak berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat "A" (Excellent) dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dengan Nomor:

TAPM.157/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 yang diserahkan pada Tanggal 29 November 2017 di Makassar. Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar

pelayanan publik dan meningkatnya lebih lagi dimasa depan baik dalam hal layanan publik dan kinerja aparatur yang ada didalamnya

Dan sebagai Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan **Assesment Surveilance yang pertama** ditahun 2023 pada tanggal 14 - 17 Juni 2023 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Papua Barat;



Dan Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan **Assesment Surveilance yang kedua** ditahun 2023 pada tanggal 18 - 21 Oktober 2023 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Papua Barat.



2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

A. Historis dan Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Fakfak

Pengadilan Negeri Fakfak (selanjutnya disebut PN Fakfak) sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Secara ideal, sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran Visi PN Fakfak, yakni “Terwujudnya Pengadilan Negeri Fakfak Yang Agung”, dan dalam upaya mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi PN Fakfak yang sinergi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja melalui Akreditasi Penjaminan Mutu dan pembentukan 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi (RB).

PN Fakfak sangat menjunjung tinggi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Maksud dari asas tersebut adalah memberikan suatu pelayanan bagi pencari keadilan baik itu dari segi pelayanan hukum maupun dari segi pelayanan publik. Dalam upaya untuk mencapai Visi, Misi dan pelayanan publik yang nyaman, transparan dan cepat sebagaimana dorongan Akreditasi Penjaminan Mutu dan bagian dari area pelayanan publik pada Reformasi Birokrasi, PN Fakfak telah berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dari sistem layanan Loker Terpadu pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan per periode Tahun 2017, yang telah diaudit Kinerja dan Integritas oleh Badan Pengawasan MA RI pada awal Oktober 2017 dan telah pula diaudit Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Auditor TAPM Badilum MA RI dengan hasil ‘A *Excellent*’, Loker Pelayanan Terpadu yang dibuat PN Fakfak pada dasarnya sama dengan konsep PTSP, akan tetapi sesuai arahan pimpinan Auditor dan memperhatikan arahan Dirjen Badilum MA RI untuk mengupayakan seluruh satker peradilan umum untuk membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka PN Fakfak telah mendukung kebijakan tersebut, sehingga berupaya keras memindahkan konsep loket terpadu yang telah ada menjadi meja layanan terpadu dalam bentuk *One Gate Integrated Service* atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut dengan PTSP).

Sebagaimana digariskan dalam konsep pelayanan terpadu sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, PTSP bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses pelayanan pengadilan melalui satu pintu, dan memangkas birokrasi pelayanan yang begitu panjang dan berbelit-belit. Selain itu PN Fakfak memandang PTSP dirancang untuk mengurangi interaksi langsung antara para aparaturnya Pengadilan dengan para pencari keadilan maupun pihak yang berkepentingan, serta memberikan pelayanan yang prima dan mengedepankan transparansi peradilan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga dapat mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Beberapa konten dan fasilitas PTSP yang telah disiapkan PN Fakfak pada saat peluncuran antara lain sesuai dengan perencanaan adalah sebagai berikut:

- ✓ Loker Layanan Terpadu yang saat ini masih berjalan, maupun PTSP PN Fakfak yang akan segera diluncurkan (*launching*) secara keseluruhan diawasi dengan kamera CCTV. Ini merupakan salah satu dari sekian ruangan PN Fakfak yang diawasi oleh CCTV, sehingga pelayanan PTSP termonitor dan terekam sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepan serta mencegah praktek kecurangan dalam melayani publik.
- ✓ Untuk memberikan layanan kepada kaum disabilitas dan masyarakat lainnya yang tergolong prioritas (lansia, dan ibu hamil), PTSP PN Fakfak terhubung dengan akses disabilitas, dan prioritas layanan bagi (disabilitas, lansia, dan ibu hamil) beserta kursi ruang tunggu prioritasnya. Akses prioritas tersebut pada PTSP PN Fakfak terkoneksi dengan mudah dari Area Parkir, terhubung melalui akses jalan difabel menuju gedung PN Fakfak (Meja PTSP) hingga ruang sidang dan Toilet Khusus Difabel, dengan begitu mudah dan nyaman.
- ✓ Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan, PTSP PN Fakfak juga menyediakan minuman dingin dan/atau minuman biasa berupa air mineral, serta permen untuk setiap tamu / pengunjung.
- ✓ Untuk meningkatkan pengetahuan secara mandiri, dalam ruang PTSP telah disiapkan beberapa pamflet kecil yang bisa diambil pengunjung/tamu, berisikan konten-konten inovasi, informasi dan layanan PN Fakfak2 termasuk

didalamnya upaya PN Fakfak dalam membangun akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai tindakan konkrit atas misi PN Fakfak dalam bentuk pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

- ✓ Adanya 2 (dua) layar TV LED flat dengan kualitas 4K 50 inch, yaitu 1 (satu) layar TV menampilkan jadwal sidang, dan 1 (satu) layar TV akan menampilkan informasi terkini (*update*) dan himbauan kepada masyarakat yang bersifat mendidik dan kesadaran hukum.
- ✓ Untuk memudahkan PN Fakfak mengevaluasi pelayanan, kinerja serta sarana prasarana, pada Meja PTSP disiapkan kuesioner manual, dan kedepan akan disiapkan kuesioner secara elektronik yang lebih mudah dan cepat sehingga akumulasi data dapat diolah.
- ✓ Dalam upaya memitigasi resiko kebakaran dan orang sakit mendadak, PTSP pada Meja Layanan Informasi dilengkapi alat pemadam kebakaran (APAR) dan kursi roda serta Kotak P3K, yang mana seluruh personil telah diberikan pelatihan menghadapi bencana alam, huru hara, pertolongan pertama atas kecelakaan, dan kebakaran.



Konsep Perencanaan 3D
Meja Layanan Kepaniteraan (Panmud Pidana, Perdata, dan Hukum) dan Meja
Layanan Kesekretariatan (Bagian Umum dan Keuangan)

Namun demikian, tidak berarti pelayanan yang mengedepankan eksekusi dan transparansi tidak berjalan, dan para pencari keadilan tidak dapat memasuki ruangan kepaniteraan maupun kesekretariatan tanpa seizin dari pimpinan masing-masing bagian tersebut, Karena area tersebut merupakan Area Terbatas (*Restricted Public Area*), sebagaimana Ketua PN Fakfak telah menetapkan dalam SK Ketua perihal 3 (tiga) zona pada area PN Fakfak, yaitu Zona Publik, Zona Terbatas (*Restricted Public Area*), dan Area Terorisasi (*Authorized Person Only*).



Desain kaca grafir yang mengedepankan kearifan lokal yang ditempatkan pada area sisi kanan dan sisi kiri PTSP. Adapun gambar sisi kanan mendeskripsikan bahwa PN fakfak berada diatas tanah Papua dengan kemilau emas, hutan, burung cenderawasih, buah pala dan pala serta tifa khas Fakfak, sedangkan sisi kiri menggambarkan PN Fakfak yang berada di Provinsi Papua Barat memiliki ciri khas adanya burung kasuari, serta adanya tungku dengan tiga batu yang mengilustrasikan kondisi sosial masyarakat Fakfak dikenal dengan 'satu tungku tiga batu', yaitu kerukunan umat beragama, serta kondisi geografis Kabupaten Fakfak yang meliputi bentangan bukit-bukit dan laut yang indah beserta kapal nelayan.

❖ Akses Menuju PTSP (Layanan Prioritas)



Parking lot khusus Prioritas (Difabel, Lansia dan Ibu Hamil) dan jalur khusus



(wheel chair line) serta dilengkapi jalur akses petunjuk bagi kaum buta menuju PTSP

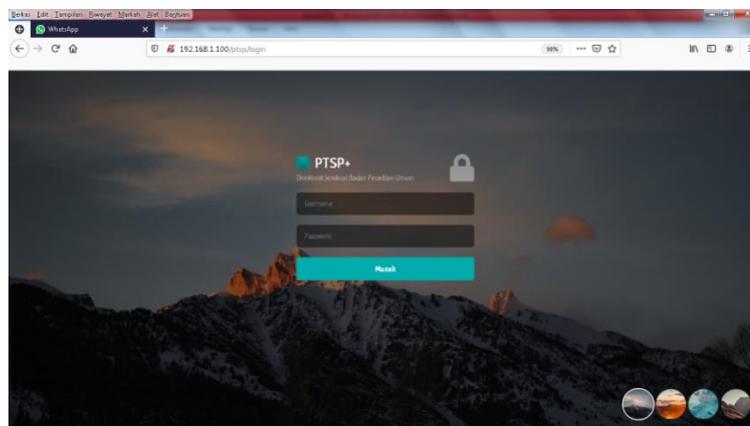
**KURSI PRIORITAS
PRIORITY SEATS**

			
KURSI RODA DIFFABLE	IBU HAMIL PREGNANT	IBU MEMBAWA ANAK MOTHER WITH INFANT	LANSIA ELDERLY

Kursi khusus Prioritas dalam Ruang Tunggu PTSP PN Fakfak

❖ Aplikasi PTSP

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Fakfak telah digunakan Aplikasi untuk sebagai inovasi dan bentuk pelayanan publik yang efisien, cepat dan terpadu. Aplikasi PTSP merupakan Aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. yang dapat dimonitoring secara keseluruhan untuk surat masuk keluar, Buku Tamu, Surat keterangan Online, dll.



Tampilan Login Aplikasi PTSP

a. Buku Tamu

Pada Tahun 2023, Pengunjung Pengadilan yang menggunakan Layanan Pengadilan dan tercatat pada Aplikasi PTSP menu Register Buku tamu berjumlah **1206 Orang Tamu**.

#	Tanggal	Nomor Register	Tujuan	Nama Tamu	Kegiatan	#
1	29/02/2023	1202/2023	Kopra Sub-Segel Ekspedisi, Organisasi dan Tambakora	Achmad Taher Tamsis	Memusulkan surat temaan pelayanan	
2	29/02/2023	1202/2023	Kopra Sub-Segel Ekspedisi, Organisasi dan Tambakora	Berita Apella Senuwastaban	Memusulkan Surat Lamanan Pelayanan	
3	28/02/2023	1202/2023	Kopra Sub-Segel Ekspedisi, Organisasi dan Tambakora	Rudyanto	memusulkan surat lamaran permohonan	
4	22/02/2023	1202/2023	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Informasi dan Pengaduan	Alfan Gohar La Ode	Memusulkan Surat Lamanan Pelayanan	
5	20/02/2023	1202/2023	Pelemba Muda Perdata	Muhammad Nisar Setiawan	memusulkan salinan putusan perkara perdata	
6	19/02/2023	1202/2023	Pelemba Muda Perdata	Muhammad Setiawan	memusulkan salinan putusan perkara perdata	
7	19/02/2023	1202/2023	Pelemba Muda Perdata	Dwico Sanny	Perwakilan Pengajuan Tapan	
8	18/02/2023	1202/2023	Pelemba Muda Perdata	Liauwina S	Surat lgn faksa	
9	18/02/2023	1202/2023	Pelemba Muda Perdata	Lili Ligeana	Surat lgn faksa	
10	18/02/2023	1202/2023	Pelemba Muda Perdata	Drs Umarin A Kusala	Perwakilan Penambahan Peraga	

b. Surat Masuk

Pada Tahun 2023, Surat Masuk dalam Layanan Pengadilan dan tercatat pada Aplikasi PTSP menu Register surat masuk berjumlah **486 Surat Masuk**

#	Tanggal Register	Nomor Agenda	Sifat Surat	Pengirim	Status	Petahana	Waktu	#
1	10/09/2024	1202024	Biasa	Kepala Kepolisian Resort Fakfak	Disposisi	Kepala: EDWIN TAPILATU, S.Ses. S.H. (Periksa)	1 Hari	
2	10/09/2024	16102024	Biasa	Direktur Jendral Badan Pendidikan Umum PA RI	Disposisi	Kepala: YURICE EUNICE CAROLINA REMBET, S.T. (Seleksi)	1 Hari	
3	10/09/2024	15102024	Biasa	Kepala Kepolisian Resort Fakfak	Disposisi	Kepala: EDWIN TAPILATU, S.Ses. S.H. (Periksa)	1 Hari	
4	10/09/2024	14102024	Biasa	Kepala Kepolisian Resort Fakfak	Disposisi	Kepala: EDWIN TAPILATU, S.Ses. S.H. (Periksa)	1 Hari	
5	10/09/2024	13102024	Biasa	Kepala Kepolisian Resort Fakfak	Disposisi	Kepala: EDWIN TAPILATU, S.Ses. S.H. (Periksa)	1 Hari	
6	10/09/2024	12102024	Biasa	Kepala Kepolisian Resort Fakfak	Disposisi	Kepala: EDWIN TAPILATU, S.Ses. S.H. (Periksa)	1 Hari	
7	10/09/2024	102024	Biasa	DIBEN BADILUH	Dibicarakan	Petahanaan Oleh: DONY HARDIHANTO, S.H.N.Hum. (Uraian Pengadilan)	0 Hari	
8	08/09/2024	9002024	Biasa	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAH	Dibicarakan	Petahanaan Oleh: DONY HARDIHANTO, S.H.N.Hum. (Uraian Pengadilan)	2 Hari	
9	08/09/2024	9102024	Biasa	Selektaris Mahkamah Agung RI	Disposisi	Kepala: ISZAL ASBAR, S.H. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)	3 Hari	
10	08/09/2024	8102024	Biasa	Selektaris Mahkamah Agung RI	Disposisi	Kepala: ISZAL ASBAR, S.H. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)	3 Hari	

c. Surat Keterangan Online

Pada Tahun 2023, pengguna Layanan eraterangsurat keterangan online dan tercatat pada Aplikasi PTSP menu Register surat keterangan berjumlah **868 Surat/Pemohon**.

#	Tanggal Register	Nomor Register	Jenis Pemohonan	Pemohon	Identitas
1	22/11/2023	866SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Sedang Diucubit Hak Nelayan	Siti Umrah Rumanukun	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920106403080001
2	22/11/2023	865SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Siti Umrah Rumanukun	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920106403080001
3	20/11/2023	866SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Sedang Diucubit Hak Nelayan	Hanna Mangana Gwagwaga	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920103140190001
4	03/11/2023	865SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Hanna Mangana Gwagwaga	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920103140190001
5	31/10/2023	864SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Luka Muri	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920104090040001
6	27/10/2023	865SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Sedang Diucubit Hak Nelayan	ABRAHAM GERAB	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920105081040001
7	27/10/2023	865SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	ABRAHAM GERAB	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920105081040001
8	27/10/2023	865SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Sedang Diucubit Hak Nelayan	VALENTINUS YMSI	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920106030880001
9	27/10/2023	865SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	VALENTINUS YMSI	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920106030880001
10	25/10/2023	859SK/M/2023/PN/PA	Surat Keterangan Tidak Sedang Diucubit Hak Nelayan	ARCESWANUS NANA	Kartu Tanda Penduduk (KTP) 920102720090001

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. MEJA INFORMASI



1. Sarana dan Prasarana meja pelayanan meja informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Meja informasi merupakan garda depan pelayanan suatu Pengadilan, Pelayanan di meja informasi akan sangat menentukan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Meja informasi Pengadilan Negeri Fakfak saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meja informasi Pengadilan Negeri Fakfak terdapat satu buah laptop untuk mendukung penginputan pemohon informasi dan data tamu, dua buku agenda untuk data pemohon informasi dan data tamu Pengadilan.

Bagi pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Fakfak untuk mendapat informasi, akan diarahkan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu kemudian petugas meja informasi akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Dan pada lobi Pengadilan Negeri Fakfak juga sudah dilengkapi dengan TV media center yang menampilkan tentang agenda persidangan hari ini, juga menampilkan video-video pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak.



Foto Meja Informasi PN Fakfak pada masa pandemi Covid-19, menggunakan pengaman pembatas

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah meja pelayanan informasi publik yang terdiri dari :

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Meja Informasi	1 Unit	Baik
2.	Kursi	2 Unit	Baik
2.	Laptop	1 Unit	Baik

2. Sumber Daya Manusia.

Dalam pengelolaan meja informasi, sesuai Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : W31.U3/39/WKPN/SK/I/2023

tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Ditunjuk beberapa nama, yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Kewenangan
1.	Ratna Keley, A.Md	Honoror	Petugas Meja Umum
2.	Robertho Tawirasaru, SH	Honoror	Petugas Meja Pidana
3.	Windi Yunitasari, SH	Honoror	Petugas Meja Hukum
4.	Yeni Anggraini, S.Sos	Honoror	Petugas Meja Perdata
5.	Oktoviana T. Watto, S.H.	Honoror	Petugas Meja Informasi

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Fakfak dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Fakfak.

4. Data Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2023, Pengunjung Pengadilan Negeri Fakfak yang menggunakan Pelayanan Informasi Publik adalah **794 Orang/Pengunjung**.

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	686	15 menit	686	-	-	-	-	-
Kepegawaian	19	15 menit	19	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	0	-	0	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	20	15 menit	20	-	-	-	-	-
Lainnya	69	15 menit	69	-	-	-	-	-
TOTAL	794		794	-	-	-	-	-

5. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2023 NIHIL.

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

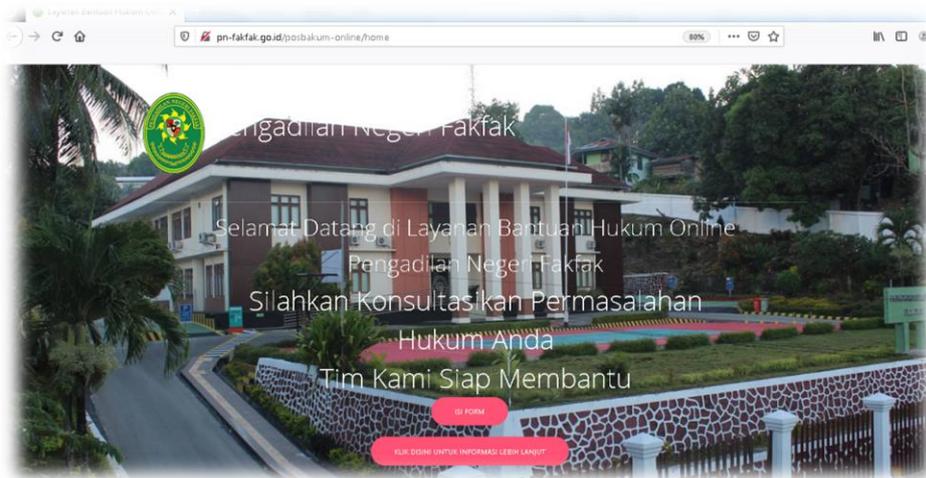
6. Data Pelayanan Pengaduan

Data Pelayanan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2023 NIHIL.

NO.	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	PENYALURAN	PEMERIKSA	PROSES PENANGANAN TERAKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

B. POSBAKUM ONLINE

Dan sebagai inovasi, Pengadilan Negeri Fakfak menampilkan Layanan Pos Bantuan Hukum Online yang dapat diakses melalui website pn-fakfak.go.id, yang merupakan hasil Aktualisasi dan Habitiasi dari Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan Inovasi Layanan POSBAKUM Online pada Website Pengadilan Negeri Fakfak

Tampilan Pengisian Form POSBAKUM Online

C. E-RATERANG

Eraterang merupakan salah satu inovasi media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Fakfak. Inovasi ini telah diterapkan di Pengadilan Negeri Fakfak sejak 1 Juli 2019, sebagai salah satu wujud

pelayanan publik yang efisien. Inovasi pelayanan publik ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan eraterang pada website Pengadilan Negeri Fakfak



Disediakannya Banner promosi tentang layanan eraterang pada pintu masuk Pengadilan Negeri Fakfak

D. VISUALISASI BERUPA VIDEO UNTUK E-COURT, GRATIFIKASI

Sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengunjung pengadilan, Pengadilan Negeri Fakfak juga menggunakan inovasi dalam peningkatan pelayanan baik penyampaian informasi mengenai e-court dan gratifikasi dalam bentuk tampilan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh pengunjung pengadilan berupa video yang ditampilkan pada TV diarea-area yang bersentuhan dengan pengunjung pengadilan.



Tampilan Profil E-Court pada LCD Lobby Pengadilan Negeri Fakfak

E. PUBLIC CAMPAIGN

Salah satu inovasi pelayanan public dengan menyelenggarakan kegiatan promosi pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak kepada Masyarakat kabupaten Fakfak dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang bukan hanya sekedar ucapan melainkan melalui Tindakan sosialisasi secara bertatapan langsung dengan Masyarakat berupa Public Campaign.



F. SIAKTIF (Sistem Informasi Chat Interaktif)

Untuk menjangkau Masyarakat pencari keadilan yang berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri Fakfak dan memudahkan mencari informasi tentang pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak melalui chat interaktif yang berkolaborasi dengan aplikasi WhatsApp.

PENGADILAN NEGERI FAKFAK

KINI HADIR LAYANAN INFORMASI TERBARU DARI PENGADILAN NEGERI FAKFAK

SIAKTIF (SISTEM CHAT INTERAKTIF)
UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LAYANAN SILAHKAN SCAN BARCODE DIBAWAH INI

0851-6149-6944

Mari Wujudkan Peradilan Yang Modern Berbasis Teknologi Informasi

BISA TERBINA

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Halo admin 11:14 UT

Ini adalah Sistem Chat Interaktif atau disebut dengan SIAKTIF. Sistem layanan informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Fakfak yang mempermudah dan membantu para pengguna layanan untuk mengakses semua informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Fakfak.

Silahkan ketik **MENU** untuk mengakses informasi.

Menu 11:14 UT

Untuk mengakses jenis layanan informasi silahkan ketik A,B,C, Det., Sesuai jenis layanan yang diinginkan:

- A. Persyaratan Pelayanan Pendata
- B. Persyaratan Pelayanan Hukum
- C. Persyaratan Pelayanan Pidana
- D. Jadwal Sidang
- E. e-Court
- F. SIPP
- G. SISIper
- H. Video Edukasi
- I. Stempel

pn-fakfak.go.id

[Pengadilan Negeri Fakfak](#)

[pn_fakfak](#)

[Pengadilan Negeri Fakfak](#)

PENGADILAN NEGERI FAKFAK
Jl. Yos Sudarso No. 92, Kel. Wagom, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak, Papua Barat
Telp. : (0956) 22413 / Fax. : (0956) 22413
E-mail : pengadilan_negeri_fakfak@bisa-terbina.go.id

G. Papedakum

Papedakum merupakan suatu inovasi pelayanan publik dalam membantu kaum rentan terkhusus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara mendampingi dan menemani dengan tujuan agar kaum rentan merasakan aman dan nyaman dalam memberikan keterangan saksi selama proses peradilan langsung.

PAPEDA-KUM
(Pendampingan Perempuan, Anak, dan Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum)

APA ITU Papedakum?
Papedakum merupakan inovasi pelayanan publik dalam membantu kaum rentan khususnya perempuan dan anak dengan memberikan bantuan pendampingan pada saat berhadapan dengan hukum

SIAPA ITU PENDAMPING?
Pendamping adalah seseorang atau kelompok yang dipercaya memiliki keterampilan untuk mendampingi kaum rentan yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat kaum rentan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung

KATEGORI PENDAMPING

- Paralegal
- Keluarga
- Psikolog
- Psikiater
- Pekerja sosial,
- Petugas Pusat pelayanan Terpadu
- Penasihat hukum
- Pendamping LSM
- Penerjemah bahasa
- dan orang yang dipercaya oleh kaum rentan untuk melakukan pendampingan

FUNGSI PENDAMPING UNTUK KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi persidangan
- pendamping berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak kaum rentan
- dalam hal diperlukan dan atas izin majelis hakim, pendamping dapat duduk di samping kaum rentan saat persidangan

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN PENDAMPING?
Kaum rentan berhadapan dengan hukum bisa langsung mengajukan kepada Hakim/Petugas Sidang di Pengadilan untuk mendapatkan pendamping atau Hakim menyarankan kepada kaum rentan untuk menghadirkan pendamping jikalau di sisi psikologi terdapat tanda-tanda tertekan pada saat persidangan.

HAK-HAK KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi
- hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Hak mendapatkan pendamping
- Hak dirahasiakan identitasnya
- Hak mendapatkan nasehat hukum
- hak mendapatkan penerjemah
- Hak mendapatkan restitusi
- Hak atas pemulihan

JANGAN MALU DAN TAKUT MEMBERIKAN SAKSI DI PERSIDANGAN

DASAR HUKUM :

- PERMA NO. 3 TAHUN 2017 PASAL 1 TENTANG PEDOMAN MELAKUKAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
- UU NO. 23 TAHUN 2002 PASAL 94 AYAT 2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG PENGEHAHAN KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYandang DISABILITAS

6

BAB VI **PENGAWASAN**

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Aparatur Negara, maka Pengawasan Internal sebagai pengendalian harus terus menerus dilakukan oleh Atasan Langsung terhadap bawahan secara preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Pengawasan Atasan Langsung ini paling potensi karena jarak antara obyek dengan subyek pengawasan berjarak dekat sehingga setiap gejala ketimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan demikian tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih dini dan lebih cepat.

Bentuk Pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung

adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian atas laporan atau isi dokumen.

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
- c. Pengawasan terhadap Penanganan Pengaduan yang meliputi pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Tahun 2023, Pengadilan Negeri Fakfak, melakukan Pengawasan Rutin oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulannya pada masing-masing Bagian.

a. Pengawasan Bagian Kesekretariatan



Pengawasan Langsung dari Sekretaris

Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pada Bidang Umum dan keuangan, Kepegawaian , Organisasi dan Tatalaksana serta Perencanaan, TI dan Pelaporan



b. Pengawasan Bagian Kepaniteraan



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Pidana



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Hukum



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Perdata



Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu

c. Pengawasan Hakim Wasmat



Pengawasan oleh Hakim Wasmat ke Lembaga Pemasarakatan Fakfak

B. EVALUASI

Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Fakfak dilakukan dengan tujuan untuk memonitor dan mengawasi semua kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Diharapkan agar kekurangan atau kesalahan yang ada dapat ditanggulangi dengan cepat.

Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Fakfak;
2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing – masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.

7

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan tugas dengan baik selama tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, serta dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Fakfak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
- ✓ Berupaya untuk semakin meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Fakfak mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

B. Rekomendasi.

1. Sehubungan dengan adanya aksi anarkis stakeholder (dalam hal ini pengunjung sidang) yang kadang-kadang mengakibatkan kerusakan pada

Gedung Pengadilan, maka seyogyanya perlu dilakukannya program penyuluhan hukum kepada masyarakat bersama dengan aparat penegak hukum lainnya pada waktu mendatang dan dimohonkan agar mendapatkan perhatian dari para pejabat pelaksana terkait. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir aksi anarkis dan sekaligus mempertinggi pemahaman masyarakat tentang hukum dan entitasnya. Kontribusi dana merupakan hal yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari program penyuluhan hukum tersebut.

2. Jika ada penempatan CPNS lagi mohon diperhatikan tempat tinggal CPNS tersebut, karena jika dilihat dari data kepegawaian Pengadilan Fakfak CPNS yang berasal Daerah luar Papua pada saat telah diangkat menjadi PNS akan mengajukan permohonan pindah ke daerah asal dengan alasan kepentingan keluarga, dengan demikian pengisian formasi yang ada menjadi kosong lagi, mengingat pula ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Fakfak mendekati usia pensiun.
3. Pemberdayaan sumber daya manusia Yudisial maupun non Yudisial sangat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan terpusat mengingat selalu ada perubahan-perubahan mendasar yang secara signifikan mempengaruhi kinerja dan harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan akuntabel serta terkait pula dengan penataan dan pengelolaan pelaporan tingkat satuan kerja yang harus dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik dan benar.
4. Salah satu faktor kepindahan Pegawai PN. Fakfak ke PN lain adalah terbatasnya sarana penunjang berupa mess untuk Pegawai. Untuk itu harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung, karena mengingat pegawai PN Fakfak yang berasal dari luar Daerah tinggal di rumah kontrakan, yang apabila dibandingkan dengan pendapatan dan kemahalan pada Kabupaten Fakfak sangat tidak berimbang (pendapatan kecil, tingkat kemahalan tinggi).

5. Seiring dengan tuntutan sebagai pegawai negeri sipil yang erat kegiatannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, maka seyogyanya perlu diberikan dengan pelatihan-pelatihan pada waktu mendatang. Oleh karena keadaan yang sering terjadi dalam penyelesaian pekerjaan adalah dilakukan sendiri dan/atau belajar dari pihak lain diluar instansi internal (otodidak).